Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 3 Nomor 1, Februari 2025 (58-73)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEMBATA DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN LEMBATA

Carles Bay Koda[1], Urbanus Ola[2], Veronika Ina Assan Boro [3]
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia [1,2,3]
Email : Charlesbaykoda@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana di Kabupaten Lembata. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana di Kabupaten Lembata. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah Agile Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit) dan Agile Governance dalam Kesiapsiagaan Bencana. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Antisipatif yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana di Kabupaten Lembata berupa membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mempercepat penanganan bencana seperti kekeringan, erupsi gunung api, tsunami, dan tanah longsor. TRC bertugas mengidentifikasi kerusakan, memetakan wilayah terdampak, menyelamatkan korban, dan mendistribusikan bantuan secara efektif. Namun, keterbatasan rambu bencana dan minimnya edukasi menghambat kesiapsiagaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran melalui penyediaan rambu, jalur evakuasi, sosialisasi, dan pelatihan rutin. Tantangan terkait dana, tenaga ahli, dan koordinasi juga perlu diatasi melalui perencanaan matang dan kerja sama lintas sektor untuk efektivitas mitigasi dan pemulihan bencana. (2) Responsif yang dilakukan BPBD Kabupaten Lembata berupa meningkatkan kesiapan bencana dengan menyediakan gudang logistik berisi makanan, obat-obatan, pakaian, dan peralatan darurat, serta sarana evakuasi seperti perahu dan mobil pemadam. Distribusi bantuan dikoordinasikan dengan TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. BPBD juga menyiapkan titik kumpul, rute evakuasi, dan posko pengungsian. Pemulihan pasca-bencana melibatkan BPBD, Dinas PUPR, PLN, Dinas Kominfo, dan masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta mendukung pemulihan ekonomi dan permukiman guna membangun ketahanan jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berperan cukup baik dalam Penanganan

bencana alam di Kabupaten Lembata. Hal ini tidak terlepas dari antisipatif dan responsif.

Kata Kunci : *Kesiapsiagaan, BPBD, Penanganan Bencana, Kabupaten Lembata*

ABSTRACT

This research is titled "The Preparedness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Disaster Management in Lembata Regency." The research problem addressed in this thesis is: How is the preparedness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in disaster management in Lembata Regency? The theories used in this study are Agile Governance and Agile Governance in Disaster Preparedness. Primary data sources include informants, while secondary data consists of documents related to the research variables. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and descriptive qualitative analysis. The research findings show that: (1) Anticipatory Efforts: BPBD formed a Rapid Response Team (TRC) to accelerate disaster management for events such as droughts, volcanic eruptions, tsunamis, and landslides. TRC is responsible for identifying damage, mapping affected areas, rescuing victims, and effectively distributing aid. However, limitations in disaster signage and lack of public education hinder community preparedness. Therefore, awareness needs to be increased through the provision of signage, evacuation routes, socialization, and regular training. Challenges related to funding, expertise, and coordination must also be addressed through careful planning and cross-sector collaboration to ensure effective disaster mitigation and recovery. (2) Responsive Efforts: BPBD enhances disaster preparedness by providing logistics warehouses stocked with food, medicine, clothing, emergency equipment, and evacuation tools such as boats and fire trucks. Aid distribution is coordinated with the military (TNI), police (Polri), and community organizations. BPBD also prepares gathering points, safe evacuation routes, and evacuation posts. Post-disaster recovery involves BPBD, the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), PLN, the Communications and Information Agency (Kominfo), and the community to repair infrastructure, healthcare facilities, education services, and support economic and housing recovery, aiming to build long-term resilience. Based on the analysis, the author concludes that BPBD has played a significant role in disaster management in Lembata Regency. This achievement stems from both anticipatory and responsive efforts.

Keywords: *Preparedness, BPBD, Disaster Management, Lembata Regency.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun

di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Indonesia adalah Negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana. Hal ini disebabkan letak geografis wilayah Indonesia terletak di daerah rawan bencana, Indonesia dilewati cincin api (*Ring Of Fire*), serta terdapat lempeng Eurosia dan Indorustralia (Deby et al., 2019, p. 34)

Terbentuknya Lembaga Penanganan Bencana di Indonesia merupakan wujud terlaksananya Undang-Undang No 24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana. Lembaga Penanganan Bencana tersebut merupakan suatu Lembaga Non Kementerian dengan nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hal ini selaras dengan isi dari Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu terbentuklah Lembaga Penanganan dari Pemerintah yang menaungi tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD dengan fungsi untuk memberikan bantuan terhadap kinerja dari Lembaga Badan Nasional Penganggulangan Bencana atau BPBD (Setyowati, 2022, p. 1)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana tersebut juga membahas tentang pengertian Bencana yaitu pada pasal 1 yang menyebutkan bahawa Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, p. Pasal 1 ayat (1,2,3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga telah membahas tentang kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh badan atau satuan atau juga unit penanggulangan bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia yaitu pada pasal 45 yang menyebutkan bahawa kesiapsiagaan dilaksanakan melalui kegiatan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, dan

penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian penyuluhan dan geladi lapang tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana serta penyediaan dan penyiapan bahan barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana (Karmila, 2017, p. 6).

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian cara antisipasi yang dilakukan untuk mencegah atau berjaga terhadap datangnya suatu bencana dengan sistematis dan langkah-langkah yang tepat serta berdaya guna (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Sedangkan pengertian kesiapsiagaan yang diartikan oleh (LIPIUNESCO/ISDR, 2006) merupakan suatu tindakan tepat guna dan cepat yang dilakukan oleh masyarakat, komunitas, individu maupun pemerintah dan lainnya terhadap datangnya suatu bencana yang tidak terduga. Implementasi dari kesiapsiagaan yaitu pembuatan rencana penanggulangan bencana dan menyelenggarakan acara pendampingan dan pelatihan terhadap tanggap darurat (Setyowati, 2022, p. 5)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata pembentukannnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lembata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi antara lain; penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah

daerah di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Kabupaten Lembata, belum bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, termasuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Serta rendanya kemampuan menghasilkan inovasi-inovasi jitu dalam mengatasi masalah-masalah kebencanaan yang selama ini menimpa Daerah Kabupaten Lembata. Hal ini bisa di lihat dari beberapa kali Bencana Beruntun seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir bandang hingga tanah longsor yang terjadi dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Tabel 1
Bencana Alam di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2021

Tahun		Bencana	Korban	Kerusakan
2018	25-1-2018	Puting Beliung	Tidak Ada	1 Rumah Rusak Berat
	12-5-2018	Gelombang Pasang /Abrasi	1 Jiwa Meninggal Dunia	Tidak Ada
	31-7 2018	Kekeringan	20,836 Menderita	Tidak Ada
	26-12-2018	Banjir	Tidak Ada	Tidak Ada
2019	25-07-2019	Kekeringan	23,408 Menderita	Tidak Ada
2020	05-01-2020	Puting Beliung	Tidak Ada	22 Rumah Rusak Ringan
	29-11-2020	Gunung Meletus	9,028 Mengungsi	21 Rumah Rusak Berat, Akibat Hujan Batu
2021	02-02-2021	Gelombang Pasang / Abrasi	65 Menderita	Tidak Ada
	04-04-2021	Banjir Bandang	46 Meninggal, 22 Hilang, Terluka 56, Menderita 27,894, Mengungsi 5,861, Total 33,876.	241 Rumah Rusak Berat, 128 Rusak Sedang, 250 Rusak Ringan: Jumlah 619 Fasilitas Pendidikan 10 Rusak Ringan Dan 7 Jembatan
	28-07-2021	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tidak Ada	246 (Ha) Kebun Rusak

Sumber : data diolah dari BPBD Kabupaten Lembata

Dari serangkaian peristiwa yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materil itu, menurut dugaan penulis karena disebabkan oleh tidak optimalnya upaya mitigasi dari pemerintah daerah. Masalah lain yaitu pemerintah belum bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, termasuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Serta rendahnya kemampuan menghasilkan inovasi-inovasi jitu dalam mengatasi masalah-masalah kebencanaan yang selama ini menimpa Daerah Kabupaten Lembata.

Agile Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit)

Konsep agile, *agility* ataupun *agile governance* awalnya adalah konsep yang dikenal dalam pengembangan perangkat lunak (*software development*). Kemudian konsep ini diadopsi ke area studi yang lain sehingga perlahan mulai dikenal di studi organisasi. Konsep agility menekankan pentingnya sikap cepat atau gesit serta luwes (Malik & Wahid, 2023, p. 90).

Word Economic Forum (WEF) mengartikan *agile governance* sebagai pemerintahan yang tangkas, adaptif, berpusat pada manusia inklusif dan pembuat kebijakan berkelanjutan yang mengakui bahwa pembuat kebijakan tidak terbatas pada pemerintah melainkan multistakeholder (Andriyani, 2021, p. 17).

Agile governance adalah konsep yang menggabungkan elemen-elemen manajemen risiko, respons bencana, dan kepemimpinan yang responsif untuk memastikan bahwa pemerintah dan organisasi terlibat dapat efektif menghadapi dan merespons bencana (Halim et al., 2021, p. 53). Berikut penjelasan lebih lanjut tentang kedua prinsip ini:

1. Prinsip Antisipatif
   Prinsip antisipatif, meliputi :
   a. Kemampuan untuk mendeteksi, memprediksi, dan merencanakan respons terhadap potensi bencana.
   b. Fokus pada pengembangan pemahaman yang mendalam tentang ancaman yang mungkin terjadi dan potensi dampaknya, termasuk perubahan iklim, gempa bumi, banjir, dan lainnya.
   c. Melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap faktor-faktor yang dapat memicu bencana dan peningkatan kapasitas untuk merespons perubahan kondisi.
   d. Mendorong pemerintah dan organisasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk meminimalkan risiko dan membangun kapasitas kesiapsiagaan.
2. Prinsip Responsif
   Prinsip responsif, meliputi :
   a. Tanggap terhadap perubahan situasi dan kebutuhan yang muncul selama bencana.
   b. Responsif berarti memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, berkoordinasi dengan efektif, dan memberikan bantuan kepada korban bencana.
   c. komunikasi yang efektif, koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, dan fleksibilitas dalam merespons situasi yang terus berubah.
   d. Pemerintah dan organisasi harus memiliki rencana respons bencana yang fleksibel dan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.

Dalam konteks *agile governance* dalam kesiapsiagaan bencana, prinsip prinsip ini diterapkan dengan cara berikut (Halim et al., 2021, p. 55):

1) Pemerintah dan organisasi berinvestasi dalam pemantauan dan peramalan bencana yang akurat untuk merencanakan dengan baik.
2) Mereka mengembangkan rencana respons bencana yang dapat disesuaikan dengan situasi dan mengintegrasikan feedback dari pelaksanaan sebelumnya.
3) Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik diterapkan untuk mengoordinasikan upaya kesiapsiagaan dan respons di

seluruh berbagai pemangku kepentingan.

4) Rekayasa ulang proses keputusan dan tindakan berdasarkan informasi yang berkembang selama bencana.

Prinsip-prinsip ini membantu pemerintah dan organisasi untuk menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi bencana, serta meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup dan pemulihan masyarakat yang terdampak.

Agile Governance dalam Kesiapsiagaan Bencana

Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/faktor non-alam ataupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda dan dampak psikologis (Maharani, 2020, p. 34).

Pengertian kesiapsiagaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 24 Th 2007, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Ichwan Muis & Khairil Anwar, 2018, p. 22)

Paramenter merupakan ukuran yang dinilai sebagai patokan untuk mengukur sesuatu. Di dalam kesiapsiagaan terdapat beberapa parameter untuk mengukur kesiapsiagaan. Menurut LIPI dan UNESCO (Taryana et al., 2022, p. 305; Alfiyani, 2021, pp. 5–6), ada lima parameter untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan yaitu :

1) Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana
2) Rencana tanggap darurat
3) Kebijakan, peraturan dan panduan untuk kesiapsiagaan,
4) Sistem peringatan bencana
5) Kemampuan memobilisasi sumberdaya.

METODE

Menurut (Arikunto Suharsimi, 1992, p. 27) penentuan suatu metode penelitian, sangat tergantung dari tujuan dan pendekatan yang diinginkan. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Namawi, 1987, p. 62)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan

menganalisis Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Dalam Penanganan Bencana Alam Di Lembata yang dianalisis menggunakan 2 aspek, yaitu : Antisipatif dan Responsif

Antisipatif

Untuk menggambarkan aspek antisipatif Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Dalam Penanganan Bencana Alam Di Lembata berupa indicator pembentukan TRC (Tim Reaksi Cepat), Pembuatan rambu tanda peringatan bahaya dan Pemasangan jalur evakuasi.

Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Lembata merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana alam yang kerap terjadi di wilayah tersebut, seperti kekeringan, erupsi gunung api, tsunami, dan tanah longsor. Mengingat sifat bencana yang tak terduga dan dampaknya yang besar, TRC bertujuan untuk mempercepat koordinasi dan respons terhadap situasi darurat. Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi, memetakan wilayah terdampak, serta segera melakukan upaya penyelamatan korban yang terjebak akibat bencana.

TRC juga memiliki peran penting dalam distribusi bantuan secara efektif, baik berupa bahan pangan, obat-obatan, maupun kebutuhan darurat lainnya. Dengan adanya tim yang terorganisir, koordinasi antar pihak yang terlibat baik pemerintah daerah, relawan, maupun masyarakat menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. Proses distribusi bantuan dapat berjalan lebih lancar, serta memastikan bahwa warga yang terdampak bencana memperoleh bantuan yang mereka butuhkan secepat mungkin, sehingga mengurangi penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, kehadiran TRC tidak hanya terbatas pada penanganan darurat, tetapi juga berfokus pada percepatan pemulihan infrastruktur dan pemulihan kondisi sosial masyarakat. TRC bekerja untuk memastikan bahwa wilayah terdampak dapat segera pulih dan kembali berfungsi dengan normal. Melibatkan berbagai elemen dalam tim ini, termasuk masyarakat setempat, memberikan rasa aman dan optimisme, karena mereka merasa ada langkah konkret untuk mengatasi ancaman bencana dan memperbaiki kehidupan pasca-bencana. Dengan demikian, TRC berperan penting dalam menciptakan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam yang mungkin terjadi di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Lembata bertujuan untuk mempercepat dan mengoordinasikan penanganan bencana alam yang sering terjadi di wilayah rawan seperti kekeringan, erupsi gunung api, tsunami, dan tanah

longsor. Tim ini berperan dalam identifikasi kerusakan, pemetaan wilayah terdampak, penyelamatan korban, dan distribusi bantuan secara efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, relawan, dan masyarakat, TRC memastikan respons cepat, pengurangan dampak bencana, serta percepatan pemulihan infrastruktur dan kebutuhan warga terdampak, sehingga memberikan rasa aman dan optimisme bagi masyarakat.

Pembuatan Rambu Tanda Peringatan Bahaya

Ketiadaan papan rambu yang menginformasikan risiko kekeringan, abrasi, dan banjir di Kabupaten Lembata merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pemahaman masyarakat terhadap bahaya bencana yang mengancam wilayah mereka. Tanpa adanya tanda-tanda yang jelas mengenai area rawan bencana, banyak warga yang tidak menyadari potensi risiko yang ada, sehingga mereka cenderung bertahan tinggal di daerah yang berpotensi terkena bencana. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang cukup besar antara ancaman yang ada dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana menghadapinya.

Selain itu, kurangnya edukasi mengenai mitigasi bencana memperburuk kondisi ini. Banyak warga yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang langkah-langkah pencegahan atau persiapan yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Tanpa adanya upaya edukatif yang terstruktur, seperti pelatihan atau sosialisasi mengenai cara-cara mengurangi risiko, masyarakat cenderung kurang siap menghadapi potensi bahaya, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanannya terhadap dampak bencana.

Penyediaan papan rambu yang informatif dan edukatif sangatlah penting untuk memperbaiki keadaan ini. Rambu-rambu yang jelas dan mudah dipahami akan memberikan peringatan dini tentang risiko yang ada, serta informasi mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengantisipasi bahaya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dan harta benda mereka. Selain itu, rambu yang berisi informasi mitigasi bencana juga akan membantu memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan upaya bersama dalam mengurangi risiko bencana di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ketiadaan papan rambu terkait kekeringan, abrasi, dan banjir di Kabupaten Lembata menghambat pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana, menyebabkan mereka tetap tinggal di area rawan tanpa informasi mitigasi yang memadai. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya edukasi, sehingga warga kesulitan mengantisipasi bahaya. Penyediaan rambu yang informatif dan edukatif sangat penting untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat, membantu mereka mengambil keputusan bijak, dan mengurangi dampak bencana di masa depan.

Pemasangan Jalur Evakuasi

Pemasangan 129 jalur evakuasi di Kecamatan Atadei, Ile Ape, dan Ile Ape Timur untuk ancaman gunung berapi, serta di Kecamatan Buyasuri, Lebatukan, Nubatukan, dan wilayah lainnya untuk ancaman tsunami, merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Lembata terhadap bencana. Jalur-jalur ini dirancang untuk memastikan bahwa warga dapat melakukan evakuasi dengan cepat dan aman saat menghadapi ancaman bencana alam yang dapat terjadi secara mendadak. Meskipun demikian, ada tantangan signifikan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti terbatasnya dana, kekurangan tenaga ahli, dan kesulitan akses di beberapa wilayah dengan medan yang sulit.

Untuk memastikan jalur evakuasi selalu dapat diakses, BPBD Kabupaten Lembata bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam memelihara jalur-jalur evakuasi yang telah dipasang. Pemeliharaan ini sangat penting, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas atau medan yang sulit dilalui. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan rutin mengenai prosedur evakuasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana cara bergerak dengan cepat dan aman ketika bencana terjadi. Namun, tantangan lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya jalur evakuasi dan koordinasi antar instansi terkait masih menjadi hambatan dalam memastikan efektivitas sistem evakuasi.

Ke depan, untuk memastikan pemasangan jalur evakuasi yang lebih efektif dan menyeluruh, diperlukan perencanaan yang matang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kerjasama lebih erat dengan pihak terkait. BPBD perlu fokus pada peningkatan pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam bidang mitigasi bencana serta menjalin kerjasama dengan lembaga donor atau pemerintah pusat guna mendapatkan dana yang cukup untuk proyek ini. Dengan perencanaan yang baik dan kolaborasi yang lebih baik antar instansi, diharapkan jalur evakuasi yang lebih efektif dapat terwujud, yang pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Lembata dalam menghadapi bencana alam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemasangan 129 jalur evakuasi di Kecamatan Atadei, Ile Ape, dan Ile Ape Timur untuk ancaman gunung berapi, serta di Kecamatan Buyasuri, Lebatukan, Nubatukan, dan lainnya untuk ancaman tsunami, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten

Lembata. Jalur-jalur ini dirancang untuk memastikan evakuasi yang cepat dan aman dalam menghadapi bencana, meskipun terdapat tantangan seperti terbatasnya dana, kekurangan tenaga ahli, dan aksesibilitas yang sulit di beberapa wilayah. BPBD bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk memelihara dan memastikan jalur evakuasi selalu dapat diakses. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan rutin penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prosedur evakuasi, namun masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan koordinasi antar instansi. Ke depan, diperlukan perencanaan yang matang, peningkatan kapasitas SDM, serta kerjasama dengan pihak terkait untuk memastikan pemasangan jalur evakuasi yang lebih efektif dan menyeluruh.

Responsif

Untuk menggambarkan aspek responsif Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Dalam Penanganan Bencana Alam Di Lembata berupa indicator persiapan logistic, sarana dan evakuasi, rehabilitasi berupa perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah bencana serta rekonstruksi berupa pembangunan kembali semua sarana prasarana atau fasilitas umum

Persiapan logistik, sarana prasarana dan evakuasi

BPBD Lembata menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana dengan mempersiapkan berbagai fasilitas logistik yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana. Gudang logistik yang ada dilengkapi dengan berbagai persediaan yang diperlukan untuk korban bencana, seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan peralatan darurat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan mendesak korban bencana dapat segera dipenuhi. Selain itu, distribusi bantuan dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan, untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Selain mempersiapkan logistik, BPBD Lembata juga memastikan ketersediaan peralatan evakuasi yang vital, seperti perahu, mobil pemadam kebakaran, tenda pengungsian, dan alat berat untuk membuka akses yang terhalang akibat bencana. BPBD juga telah menetapkan titik kumpul dan rute evakuasi yang aman, dengan prioritas utama di daerah-daerah yang rawan bencana. Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko dan memastikan evakuasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian material.

Koordinasi yang baik antar lembaga, seperti BNPB yang membangun posko pengungsian untuk menyediakan tempat aman bagi warga yang mengungsi, menjadi aspek penting dalam penanggulangan bencana. Dengan bantuan logistik yang lengkap, termasuk tenda, masker, obat-obatan,

dan makanan, serta posko pengungsian yang memadai, BPBD Lembata mampu memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Kesiapan logistik yang terencana dan koordinasi antar lembaga yang solid merupakan kunci utama dalam memastikan bantuan sampai tepat waktu dan dapat meringankan penderitaan korban bencana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa BPBD Lembata telah berkomitmen untuk meningkatkan kesiapan penanggulangan bencana, dengan mempersiapkan gudang logistik yang dilengkapi persediaan kebutuhan korban bencana, seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan peralatan darurat. Distribusi bantuan dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan. BPBD juga menyiapkan peralatan evakuasi, seperti perahu, mobil pemadam kebakaran, tenda pengungsian, serta alat berat untuk membuka akses yang tertutup akibat bencana. Selain itu, BPBD menetapkan titik kumpul dan rute evakuasi yang aman, dengan prioritas evakuasi di daerah rawan bencana. Bantuan logistik, termasuk tenda, masker, obat-obatan, dan makanan, juga disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana, sementara posko pengungsian dibangun oleh BNPB untuk memberikan tempat aman bagi warga yang mengungsi. Koordinasi yang baik antar lembaga dan kesiapan logistik yang terencana menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan sampai tepat waktu dan meringankan penderitaan korban bencana.

Rehabilitasi berupa perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah bencana

Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPBD, PLN, dan Dinas Kominfo sangat krusial dalam upaya pemulihan pasca-bencana di Kabupaten Lembata. Setelah bencana terjadi, rehabilitasi infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan listrik dan komunikasi yang rusak menjadi prioritas utama. Pemulihan infrastruktur ini sangat penting untuk memastikan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat tetap terjaga, sekaligus memperlancar distribusi bantuan yang dibutuhkan oleh korban bencana. Tanpa koordinasi yang baik antara berbagai instansi, proses pemulihan infrastruktur ini bisa terhambat, yang akan menghambat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak.

Selain rehabilitasi infrastruktur, upaya pemulihan juga mencakup rehabilitasi kawasan pesisir yang terdampak abrasi. Penanaman tanaman bakau dan malapari dilakukan untuk memperkuat ekosistem pesisir dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam seperti tsunami dan gelombang tinggi. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat dalam memperbaiki

kondisi lingkungan, tetapi juga berperan dalam menciptakan perlindungan alam bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Penanaman vegetasi pesisir ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana alam yang sering terjadi di daerah pesisir Kabupaten Lembata.

Sinergi antara instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat lokal merupakan faktor kunci dalam mempercepat proses pemulihan dan membangun ketahanan jangka panjang terhadap bencana. BPBD, PUPR, PLN, dan Dinas Kominfo perlu terus berkoordinasi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa pemulihan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan memastikan bahwa langkah-langkah rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Lembata dapat menciptakan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi bencana di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPBD, PLN, dan Dinas Kominfo sangat krusial dalam pemulihan pasca-bencana di Kabupaten Lembata. Upaya rehabilitasi infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan listrik serta komunikasi yang rusak akibat bencana, memulihkan aksesibilitas, mobilitas masyarakat, dan distribusi bantuan. Selain itu, rehabilitasi kawasan pesisir yang terdampak abrasi dengan penanaman tanaman bakau dan malapari juga dilakukan untuk memperkuat ekosistem pesisir dan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Sinergi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam mempercepat pemulihan dan menciptakan ketahanan jangka panjang terhadap bencana di masa depan.

Rekonstruksi berupa pembangunan kembali semua prasarana dan sarana atau fasilitas umum.

Proses rekonstruksi pasca-bencana di Kabupaten Lembata melibatkan upaya besar untuk membangun kembali infrastruktur dan fasilitas vital yang rusak akibat bencana alam seperti puting beliung, gelombang pasang, letusan gunung, dan kebakaran. Pembangunan sarana transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan menjadi prioritas utama untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang sangat dibutuhkan pasca-bencana. Selain itu, pemulihan terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi juga menjadi fokus penting dalam upaya mencegah potensi wabah penyakit yang sering kali menyusul bencana alam. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan membangun kembali fondasi sosial dan ekonomi yang terganggu.

Kerja sama antara BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sipil sangat krusial dalam mempercepat proses pemulihan. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, dari koordinasi logistik, distribusi bantuan, hingga pengawasan pelaksanaan proyek-proyek rekonstruksi. Keterlibatan masyarakat sipil juga penting untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal terakomodasi dengan baik, serta agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan warga setempat. Sinergi ini memungkinkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan mempercepat pemulihan kondisi di lapangan, terutama di daerah-daerah yang terdampak paling parah.

Proyek-proyek seperti pembangunan rumah dan sekolah baru menjadi simbol pemulihan bagi masyarakat Lembata, memberi mereka rasa aman dan harapan untuk memulai kehidupan baru. Rumah-rumah yang dibangun kembali tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mengembalikan stabilitas psikologis masyarakat yang kehilangan tempat tinggal mereka. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang diperbaiki, anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan lebih baik. Selain itu, adanya infrastruktur yang lebih baik akan mendukung pemulihan ekonomi, memberikan lapangan kerja, dan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk kembali membangun kehidupan mereka. Harapannya, dengan dukungan infrastruktur yang lebih kuat, masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih stabil dan optimis di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses rekonstruksi pasca-bencana di Kabupaten Lembata melibatkan upaya besar untuk membangun kembali infrastruktur dan fasilitas vital yang rusak akibat bencana alam, seperti puting beliung, gelombang pasang, gunung meletus, dan kebakaran. Upaya ini mencakup pembangunan sarana transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta pemulihan ekonomi dan permukiman. Kerja sama antara BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mempercepat pemulihan dan memastikan bantuan tersebar dengan tepat. Proyek seperti pembangunan rumah dan sekolah baru menjadi simbol pemulihan bagi masyarakat, memberi mereka rasa aman dan harapan untuk memulai kehidupan baru. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih stabil dan optimis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Dalam Penanganan Bencana Alam Di Lembata, penulis

menyimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berperan cukup baik dalam Penanganan bencana alam di Kabupaten Lembata. Hal ini tidak terlepas dari antisipatif dan responsif

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyani, C. (2021). *Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Bali Cici Noer Alfiyani NPP. 30.0529*. Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. IPDN.

Andriyani, E. (2021). *Penerapan Agile Governance Dalam Aplikasi Layanan Kependudukan Berbasis Online Sipon Keduten Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Arikunto Suharsimi. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Deby, A. C., Cikusin, Y., & W, R. P. (2019). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu). *Jurusan Respon Publik*, *13*(3), 34–41. http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3695

Hadari Namawi. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.

Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *7*(1).

Ichwan Muis, & Khairil Anwar. (2018). Model Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. *Asian Social Work Journal*, *3*(4). http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=832416&val=13516&title=Community Preparedness Model in Landslide Disaster Risk Reduction in Tugumukti Village Cisarua Subdistrict West Bandung District Indonesia

Karmila. (2017). *Kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana daerah terhadap penanggulangan bencana banjir di kabupaten gowa*. Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

Maharani, N. (2020). Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi Di SMPN 3 Kuta Selatan Badung Provinsi Bali. *PENDIPA Journal of Science Education*,

4(3). https://doi.org/10.33369/pendipa.4.3.32-38

Malik, I., & Wahid, N. (2023). Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4 . 0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar Implementation of Agile Governance in Bureaucratic Reform 4 . 0 at the Puslatbang KMP LAN Makassar City. *Jurnal Administrasi Publik IAN*, *19*(1).

Setyowati. (2022). *Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menghadapi Bencana Banjir di Kabupaten Bondowoso*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Taryana, A., El Mahmudi, M. R., & Bekti, H. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, *13*(2). https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.37997